

INTEGRASI GENDER DALAM PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

RITA NUR SUHAETI DAN EDI BASUNO
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor
Badan Litbang Pertanian, Bogor

ABSTRACT

To implement gender mainstreaming activity in relation to regional development, mainly for coastal development, a study on gender mainstreaming had been carried in two districts, namely Buton in Southeast Sulawesi and Cirebon in West Java out from June to December 2003. Data and information were collected using Focused Group Discussion approach as well as village level profiles and monograph. Gender analysis using Harvard Framework was implemented, covering profiles of participation, access, control and influencing factors. The study results showed that in Buton, labor division between man and woman in sea weed farming was relatively balanced. Participation rate of the household members, both in domestic, public and social sector in both studied locations was relatively similar. The role of Women Empowerment Division of The Agency for Society Empowerment (ASE) in Cirebon has not been optimal and still learning to find out suitable activities to meet its mandates. In Buton District, there was a coordination problem in implementing gender mainstreaming program, because there were two institutions both claimed responsible in implementing gender mainstreaming program. One important thing that has never been conducted in the two districts was to create collaboration among institutions responsible for the gender mainstreaming implementation. In the future, The District Level Marine and Fishery Service Office should work in collaboration with the ASE and they have to discuss how to incorporate gender aspects in coastal development including in Economic Empowerment for Coastal Community.

Keywords: Gender Mainstreaming, Coastal Area, Fishery, Community Development

PENDAHULUAN

Setelah Otonomi Daerah diberlakukan sejak tahun 2001, terjadi perubahan paradigma pembangunan, yaitu dari yang berorientasi sentralistik ke arah desentralisasi. Perubahan tersebut tentunya membawa konsekuensi yaitu: pemerintah harus memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk ikut menentukan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan berbagai permasalahan dan kebutuhan daerah setempat. Dari sisi pemerintah, dalam rangka memberikan fasilitasi kepada masyarakat sering tidak dilandasi oleh hasil-hasil identifikasi faktor-faktor penyebab yang berbasis gender. Banyak kalangan yang menilai pembangunan yang berjalan hingga saat ini masih netral gender, artinya masih banyak

ketimpangan atau kesenjangan hubungan relasi antara berbagai pihak gender terutama antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh haknya. Hak tersebut dapat ditinjau dari aspek perolehan akses (peluang), partisipasi aktif dalam pelaksanaan, keikutsertaan untuk menentukan berbagai kebijakan pembangunan maupun perolehan manfaat dari hasil kegiatan atau aktifitas pembangunan yang telah dilaksanakan. Oleh sebab itu muncul berbagai penilaian bahwa kedudukan dan peran perempuan masih berada pada posisi termarjinalkan, tersubordinasi atau bahkan diperlakukan secara diskriminatif, selain berbagai tindak kekerasan lainnya.

Sebagai gambaran adalah di bidang ekonomi, kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah, demikian juga halnya dengan akses terhadap berbagai sumber daya strategis seperti teknologi, informasi pasar, kredit dan modal kerja. Secara umum tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan, yaitu 83,6 persen berbanding 51,2 persen. Hal ini berakibat pada tingkat pengangguran perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Padahal upah yang diterima pekerja perempuan seringkali jauh lebih rendah dari laki-laki. Misalnya, dengan tingkat pendidikan yang sama, pekerja perempuan hanya menerima sekitar 50 sampai 80 persen dari upah yang diterima laki-laki. Banyak perempuan bekerja pada jenis-jenis pekerjaan yang marjinal, seperti buruh lepas, atau pembantu rumah tangga tanpa memperoleh upah atau jika memperoleh upah pun besarnya relatif rendah. Selain itu pekerja perempuan tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan.

Khusus di sektor pertanian dalam arti luas, termasuk perikanan, kontribusi perempuan di sektor ini sangat signifikan, baik dalam proses produksi, panen maupun pascapanen. Peran tersebut mampu memberikan sumbangan yang besar bagi penghasilan keluarga dan kegiatannya dapat direpresentasikan melalui: (1) bekerja di lahan sendiri, (2) sebagai buruh tani, (3) bekerja di luar sektor pertanian, seperti memproduksi kerajinan, berdagang, serta (4) pekerjaan yang tidak langsung menghasilkan, yaitu pekerjaan mengurus rumah tangga (Sajogyo, 1987). Lebih ekstrem lagi, perempuan dari keluarga tani berlahan sempit berperan sebagai penghasil nafkah utama dalam rumah tangga, bahkan bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya. Kondisi tersebut diperburuk dengan *trend* terjadinya bias gender, sehingga

memperuncing terjadinya berbagai macam ketidakadilan, terutama terhadap perempuan (Fakih, 1996). Salah satu akibatnya adalah terjadinya proses marjinalisasi atau pemiskinan ekonomi, sosial dan budaya bagi kaum perempuan.

Jumlah dan curahan waktu perempuan dalam kegiatan rumah tangga pada umumnya lebih tinggi dari curahan tenaga kerja laki-laki. Argumentasinya, karena perempuan merupakan penanggungjawab pekerjaan domestik (pengaturan rumah tangga) yang membutuhkan waktu yang lebih banyak. Pekerjaan rumah tangga tersebut dilakukan sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan mencari nafkah. Peran ganda inilah yang menyebabkan mobilitas tenaga kerja perempuan terbatas (Sajogyo, 1987). Secara kuantitatif, peran ganda perempuan akan sangat besar apabila kegiatan pencaharian nafkah dilakukan di lahan kering dengan komoditas utama hortikultura yang memerlukan ketekunan, ketelitian dan kesabaran.

Guna mengimplementasikan pengarusutamaan gender di daerah pengembangan wilayah, khususnya kegiatan lintas sektor pengembangan kawasan pesisir, dipilih dua kabupaten, yaitu Buton di Sulawesi Tenggara dan Cirebon di Jawa Barat. Kegiatan tersebut meliputi: pemetaan permasalahan gender dan melakukan sosialisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada para pelaksana PUG di dua lokasi studi.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran perempuan di sektor pertanian dalam arti luas, termasuk sektor perikanan, tidak dapat disangsikan lagi, karena memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Meskipun perannya sangat strategis, posisi perempuan masih dan cenderung terus termarginalkan terutama dalam akses dan kontrol sumberdaya dan manfaat seperti: kredit, teknologi, informasi dan kesempatan menambah pengetahuan. Kondisi ini diperburuk dengan kebijakan pemerintah dalam berbagai kegiatan pertanian yang belum memperhitungkan perempuan.

Pada subsektor usahatani padi dan palawija, peran aktif perempuan lebih besar dibanding laki-laki, khususnya pada kegiatan penanaman, penyiangan, pascapanen dan pemasaran, namun akses dan kontrol sumberdaya lebih didominasi oleh laki-laki (Departemen Pertanian, 1991). Hal ini memerlukan solusi lebih lanjut terutama dalam

hal optimasi peran perempuan, agar perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan pertanian selanjutnya dapat memperhitungkan dan memberi peran optimal kepada perempuan. Khusus di bidang perikanan, walaupun dari kegiatan penangkapan kontribusi perempuan tidak pernah terdengar, namun dari kegiatan pemasaran dan pengolahan pascatangkap kontribusi perempuan relatif dominan.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (BPS, 1999) menunjukkan bahwa dari 47,1 juta penduduk berumur 10 tahun ke atas, terdapat sekitar 23 juta orang yang lapangan perkerjaan utamanya di sektor pertanian dengan rasio perempuan dan laki-laki sebesar 43,7 persen di perkotaan dan 63,1 persen di pedesaan. Dari jumlah tersebut, terdapat 3,3 juta orang miskin dan 500 ribu kepala keluarga diantaranya adalah kepala keluarga perempuan. Satu dari setiap sepuluh keluarga tersebut termasuk dalam kategori keluarga miskin (Asian Development Bank, 2001).

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang tidak terbatas, perempuan di perkotaan mulai menyadari ketertinggalannya. Kesadaran ini mendorong kaum perempuan untuk memperjuangkan haknya dalam mengaktualisasikan dirinya agar lebih berperan dan mendapat akses yang seimbang di segala bidang pembangunan. Sebaliknya perkembangan tersebut relatif lambat untuk wanita yang tinggal di pedesaan karena keterbatasan fasilitas umum yang tersedia, seperti informasi dan sentuhan teknologi, sehingga aktualisasinya dalam pembangunan masih jauh dari harapan.

Dalam rangka meningkatkan peran perempuan di pedesaan tersebut, diperlukan strategi dalam pemberdayaan peran perempuan sesuai kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat atau yang spesifik lokasi. Salah satu strategi akselerasi peran perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan adalah dengan memperhitungkan dan bekerja sama dengan kaum lelaki (Kantor Negara Pemberdayaan Perempuan, 2002). Pada intinya pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*) dilaksanakan dengan penekanan pada azas hubungan timbal balik, proporsionalitas, kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki (Vitayala, 2001). Melalui pendekatan semacam ini, maka persoalan ketidakadilan gender dan marginalisasi perempuan diharapkan secara sistematis dapat diminimalkan.

Ketidakadilan gender dalam masyarakat pedesaan secara faktual sangat menonjol. Untuk pekerjaan yang sama di bidang pertanian, perempuan sering memperoleh upah

yang lebih rendah dibandingkan upah yang diterima laki-laki. Selain itu laki-laki lebih mendominasi sektor publik, sedangkan perempuan hanya berada di sektor domestik yang secara ekonomis dianggap kurang strategis. Bahkan untuk berbagai pekerjaan yang secara tradisional merupakan pekerjaan perempuan, jika teknologi mekanis sudah masuk ke dalamnya dan secara ekonomis dianggap lebih menguntungkan, maka biasanya laki-laki akan mengambil peran tersebut atau menggantikan peran perempuan. Dengan demikian insentif ekonomi tampaknya memegang peranan penting dalam menentukan peran gender (Harsoyo *et al.*, 1999). Untuk itu keterampilan perempuan perlu ditingkatkan agar dapat bekerja dengan kualitas yang sebanding, bahkan lebih baik dengan yang dilakukan laki-laki.

Erat kaitannya dengan keterampilan tersebut adalah kegiatan pengolahan ikan di desa pantai. Kegiatan pengolahan ikan pascatangkap bertujuan untuk mempertahankan kualitas ikan agar dapat dikonsumsi dalam waktu lebih lama. Selain itu, pengolahan juga bertujuan untuk menghasilkan produk baru yang karakteristiknya jauh berbeda dari ikan segar. Jenis pengolahan ini ada yang sifatnya masih tradisional dan ada yang sudah lebih maju. Termasuk pengolahan tradisional, adalah pengeringan dengan sinar matahari, pengasinan, fermentasi dan pemindangan. Pada pengolahan yang sifatnya lebih maju telah memasukkan unsur teknologi yang lebih tinggi, misalnya pendinginan dan pembekuan (Anonim, 2002).

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dengan nara sumber dan petani responden melalui pendekatan *Focused Group Discussion* (FGD) serta pengumpulan data profil dan monografi desa. Kegiatan FGD dilakukan dalam dua tingkatan, yakni tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan/desa.

Lokasi Penelitian

Kajian ini dilakan di empat desa di Kabupaten Cirebon dan di dua desa di Kabupaten Buton. Untuk Kabupaten Cirebon, kajian dilakukan di Kecamatan Mundu dengan empat desa sebagai berikut: (1) Desa Mundu Pesisir, (2) Desa Citemu, (3) Desa

Waruduwur dan (4) Desa Bandengan. Untuk Kabupaten Buton, kajian dilakukan di Kecamatan Lakudo, yakni di Desa Madongka dan Desa Wanepa-nepa.

Tahapan Penelitian

Tahapan dalam pelaksanaan penelitian meliputi (a) pengumpulan data sekunder, (b) pengumpulan informasi dari narasumber, (c) wawancara dengan responden, d) analisis gender dengan menggunakan Analisis Kerangka Harvard. Analisis Kerangka Harvard merupakan salah satu alat pengumpul informasi baik secara umum maupun terinci sesuai kebutuhan masing-masing sektor. Kerangka ini dipergunakan untuk membangun sebuah uraian dan analisis gender di kalangan masyarakat tertentu, kebutuhan strategi gender dan transformasi hubungan gender. Tiga komponen utama dalam Kerangka Harvard adalah (1) profil partisipasi, (2) profil akses dan kontrol serta (3) faktor-faktor yang mempengaruhi. Gambaran umumnya adalah profil aktivitas responden untuk mengidentifikasi ciri-ciri kegiatan publik, domestik dan kemasyarakatan yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya siapa melakukan apa, waktu melakukan kegiatan, frekuensi dan lokasi. Profil akses dan kontrol untuk mengidentifikasi sumber daya yang dipakai dalam melakukan aktivitas, sekaligus untuk mengetahui sistem pengambilan berkaitan dengan sumber daya tersebut. Hal ini akan menunjukkan siapa yang mempunyai akses terhadap sumberdaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Buton

Kabupaten Buton dengan luas wilayah 54.190 km² memiliki wilayah perairan seluas 47.697 km² (88%). Garis pantainya sepanjang 1.026 km dengan sumber daya perikanan sangat beragam dilihat dari jenis dan potensinya. Kecamatan Lakudo yang menjadi lokasi kajian terletak di P. Muna. Luas keseluruhan Kecamatan Lakudo 225 km² dengan topografi datar, bergelombang sampai berbukit. Kecamatan ini meliputi 3 kelurahan dan 9 desa dengan 31 dusun/lingkungan dan 51 unit rukun tetangga. Jenis tanah dominan adalah kambisol dan kapur. Suhu rata-rata 28°C dengan kelembaban udara 71 persen. Curah hujan rata-rata sebesar 1.473 mm/th dengan kategori daerah semi kering

(jumlah curah hujan kurang dari 1.700 mm/th). Musim hujan terjadi pada bulan Desember hingga Juli dan musim kemarau terjadi selama 7 bulan dari bulan Agustus sampai dengan November.

Di Kecamatan Lakudo terdapat Teluk Lasongko yang merupakan teluk terluas di Kabupaten Buton, yakni seluas 42km² dengan panjang pantai 29,6 km. Keberadaan teluk ini cukup unik dan memiliki nilai strategis bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Buton.

Jumlah penduduk Kecamatan Lakudo pada tahun 2002 adalah 22.686 jiwa, terdiri dari 4.762 kepala keluarga (KK), sehingga ukuran keluarganya (*family size*) adalah 4,8 orang/KK. Artinya, seorang kepala keluarga harus menghidupi hampir 5 orang termasuk dirinya sendiri. Penduduk laki-laki sebanyak 11.291 orang dan penduduk perempuannya 11.395 orang, sehingga *sex ratio*-nya 0,99. Artinya untuk setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Etnis Buton merupakan etnis dominan di kecamatan ini. Mobilitas penduduk relatif tinggi dan ini dipengaruhi oleh kemampuan wirausaha masyarakat yang relatif tinggi.

Data tahun 2001 menunjukkan bahwa mata pencaharian sebagian besar penduduk di Kecamatan Lakudo adalah di sub-sektor tanaman pangan (29,3%). Dari angka tersebut, 53 persennya merupakan pekerja perempuan. Di bidang perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 17,8 persen pada lapangan pekerjaan, perempuan hanya menduduki 22,2 persen. Namun secara keseluruhan, tampaknya lebih banyak perempuan yang memiliki pekerjaan dibandingkan laki-laki (51% dan 49%).

Dengan adanya Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di tujuh desa di Kecamatan Lakudo, sebanyak 72 unit kelompok usaha bersama (KUB) telah dibentuk untuk memperlancar pelaksanaannya. Kegiatan anggota kelompok tersebut terdiri dari berbagai bidang, seperti nelayan tangkap, pemindang, pemasok es batu, pedagang kecil ikan dan pembudidaya rumput laut. Total jumlah anggota sampai tahun 2002 sebanyak 485 orang. Di antara berbagai kelompok tersebut, kelompok pemindang merupakan kelompok yang paling prospektif untuk dikembangkan mengingat permintaan terhadap ikan pindang relatif tinggi.

Dari dua desa yang menjadi lokasi kajian di Kecamatan Lakudo, Desa Madongka merupakan desa yang tingkat sosial ekonomi masyarakatnya relatif lebih rendah

dibanding Desa Wanepa-nepa. Hal ini merupakan akibat dari isolasi, karena baru setahun terakhir ini dibuka jalan ke desa ini. Selain itu tingkat pendidikan masyarakatnya juga lebih rendah, baru ada seorang sarjana agama di Desa Madongka. Hampir seluruh kepala keluarga memiliki pekerjaan sebagai nelayan tangkap skala kecil. Selain itu, budi daya rumput laut juga merupakan usaha yang memberikan kontribusi nyata pada pendapatan masyarakat Desa Madongka. Setiap bulan sekitar 20 ton rumput laut dikirim ke luar desa yang selanjutnya dibawa ke Bau-Bau dan kota-kota lain, sebagai bahan baku industri kosmetik dan pangan.

Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon dengan luas wilayah 986,0 km² merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara topografis, Kabupaten Cirebon terletak pada ketinggian 0 – 130 m dpl. Iklim dan curah hujan di Kabupaten Cirebon dipengaruhi alam pantai terutama di bagian utara, timur dan barat sedangkan bagian selatan merupakan kawasan perbukitan di mana terdapat curah hujan paling tinggi, sekitar 1000-3000 mm, khususnya di kaki Gunung Ciremai.

Lokasi kajian adalah Kecamatan Mundu, salah satu kecamatan yang memiliki wilayah pantai di antara 7 kecamatan lainnya di Cirebon. Kajian melibatkan empat desa, yakni Desa Waruduwur, Citemu, Bandengan dan Mundu Pesisir. Pemilihan Kecamatan Mundu didasarkan oleh potensi yang luar biasa, khususnya untuk usaha rajungan, baik yang dijual segar, dimasak maupun yang dikupas (diambil dagingnya). Selain itu, potensi udang, bandeng dan tongkol juga cukup baik. Khusus untuk bandeng dan tongkol diolah menjadi ikan pindang.

Penduduk Kecamatan Mundu pada tahun 2002 berjumlah 58.785 orang terdiri dari 15.041 KK. Oleh karena itu angka ukuran keluarganya adalah 3,9 yang berarti setiap KK menanggung beban hampir 4 orang termasuk dirinya sendiri. Jumlah penduduk laki-lakinya sedikit lebih banyak yaitu 29.868 orang dan penduduk perempuannya 28.917 orang. Dengan demikian *sex rasionya* sebesar 1,03.

Masyarakat di ke empat desa contoh sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan khusus di Desa Citemu lebih dari 85,4 persen. Di Desa Waruduwur, 29,8 persen penduduknya bekerja sebagai petani, ini lebih tinggi dari angka di tingkat

kecamatan yang hanya 3,8 persen. Selain sebagai petani, buruh industri di Desa Waruduwur dan Mundu Pesisir juga cukup banyak, yakni masing-masing 22,5 dan 36,6 persen, sedang angka-angka tersebut di tingkat kecamatan masing-masing hanya 11,6 dan 19,1 persen.

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Mundu relatif rendah, sebagian besar hanya sampai sekolah dasar (SD), bahkan sebagian tidak tamat. Di Desa Waruduwur dan Citemu masih ditemukan penduduk yang buta huruf, baik huruf Arab maupun latin dan penduduk yang tidak tamat SD. Di dua desa lainnya tidak lagi terdapat penduduk yang buta huruf. Sebaliknya, di Desa Bandengan 8,2 persen penduduknya berpendidikan sarjana.

Partisipasi Anggota Keluarga dalam Sektor Domestik, Publik, dan Sosial Kemasyarakatan

Karakteristik peserta kegiatan FGD di dua lokasi kajian dapat dilihat dari umur, tingkat pendidikan dan partisipasi dalam diskusi. Umur peserta di Cirebon relatif lebih muda, tingkat pendidikan peserta FGD di Buton lebih rendah, yakni SD dibandingkan dengan peserta kegiatan FGD di Cirebon, yakni SMP. Tingkat partisipasi perempuan dalam diskusi di Cirebon jauh lebih tinggi (72,72%) dibanding di Buton (42,5%).

Dari kegiatan FGD yang telah dilaksanakan, terdapat kesan bahwa partisipasi anggota keluarga baik dalam sektor domestik, publik dan sosial kemasyarakatan di dua lokasi kajian relatif sama. Artinya tidak terdapat perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Tabel 1 menyajikan partisipasi anggota keluarga yang terdiri dari laki-laki dewasa (L_D), laki-laki anak-anak (L_A), perempuan dewasa (P_D) dan perempuan anak-anak (P_A). Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 10 kegiatan domestik yang ditanyakan, perempuan dewasa melakukan semua kegiatan tersebut (100%), sedangkan laki-laki dewasa hanya melakukan 2 macam kegiatan domestik (20%). Perempuan anak-anak masih melakukan 4 macam kegiatan domestik (40%) lebih banyak dibanding laki-laki dewasa, sedangkan laki-laki anak-anak tidak melakukan satu pun kegiatan domestik. Hal ini menunjukkan sosialisasi yang timpang untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak mengherankan jika setelah mereka besar, anak laki-laki beranggapan bahwa pekerjaan domestik adalah pekerjaan perempuan.

Untuk mengubah persepsi seperti tampaknya memerlukan waktu yang panjang. Seperti pada perubahan sosial lainnya yang memerlukan proses lama, mungkin harus ada kampanye nasional yang mengajak seluruh keluarga agar tidak membeda-bedakan sosialisasi pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik sebaiknya menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian pekerjaan tidak akan menumpuk pada salah satu pihak gender saja dan ketidakadilan serta ketimpangan gender akan dapat dikurangi.

Tabel 1. Kegiatan Domestik Masyarakat di Dua Lokasi Kajian

No.	Jenis Kegiatan	L _D	L _A	P _D	P _A
1.	Memasak	-	-	V	-
2.	Mencuci baju	-	-	V	-
3.	Menyeterika	-	-	V	-
4.	Mencuci piring	-	-	V	-
5.	Mengambil air	V	-	V	-
6.	Menyapu rumah	-	-	V	V
7.	Menyapu halaman	-	-	V	V
8.	Mengepel	-	-	V	V
9.	Mengurus anak	V	-	V	-
10.	Belanja sehari-hari	-	-	V	V
	Frekuensi	2	0	10	4

Tabel 2 menyajikan kegiatan harian perempuan dewasa di empat desa Kecamatan Mundu, Cirebon. Perempuan yang terlibat dalam pembuatan pindang mengalokasikan waktu lebih banyak dari pada yang terlibat dalam kegiatan mengupas rajungan. Mereka bangun lebih awal yakni pukul 03.00 dan pergi tidur pada waktu yang sama dengan mereka yang terlibat dalam kegiatan mengupas rajungan. Namun perempuan yang terlibat dalam pengupasan rajungan juga mengalokasikan waktu untuk membuat wadong atau jurai, yaitu alat tangkap rajungan yang ramah lingkungan. Alat ini dimodifikasi dari alat yang sama buatan Taiwan.

Tabel 2. Kegiatan Harian Perempuan Dewasa di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon

No.	Waktu	Jenis Kegiatan
1.	Rajungan	
	▪ 04.00 – 06.30	Domestik
	▪ 06.30 - 11.00	Membuat wadong/jurai dan domestik
	▪ 11.00 – 21.00	Kupas rajungan diselang pekerjaan domestik
	▪ 21.00 – 04.30	Istirahat

2.	Pindang	
	▪ 03.00 – 11.00	Ke pasar: jual pindang, beli bahan pindang
	▪ 11.00 – 14.00	Istirahat/domestik
	▪ 14.00 - 18.00	Membuat pindang
	▪ 18.00 – 21.00	Domestik
	▪ 21.00 – 03.00	Istirahat

Tabel 3 menyajikan permasalahan yang dialami peserta kegiatan FGD menurut urutannya. Masalah utama yang dihadapi adalah harga-harga yang tidak menentu dan harga-harga input cenderung tinggi, sebaliknya dengan harga produk. Khusus untuk usaha rajungan kupas, masalah bertambah dengan adanya sistim pembayaran kemudian oleh pengusaha, disamping dikeluhkan tidak adanya penyuluhan tentang teknik pengolahan hasil laut yang baik.

Tabel 3. Urutan Masalah yang Dihadapi para Peserta Kegiatan FGD di dua Lokasi Kajian

No.	Jenis Usaha	
	Rajungan	Pindang
1.	Harga produk tidak stabil, cenderung rendah atau dipermainkan pihak pabrik atau pedagang pengumpul	Harga bahan lebih tinggi, tidak sesuai dengan harga produk
2.	Sistem pembayaran tunda (1-2 minggu setelah penyerahan barang), hal ini juga terkait dengan ketersediaan modal yang kurang, padahal bahan harus dibayar secara tunai, tidak dapat menunggu 1-2 minggu	Mutu bahan kurang baik mengakibatkan kualitas produk juga kurang baik
3.	Kualitas bahan yang kurang mendukung, terutama pada musim panas, ukuran kecil-kecil dan kualitas dagingnya kurang baik	Ketersediaan BBM kadang-kadang tidak mendukung
4.	BBM kadang menjadi masalah	Ketersediaan modal kurang
5.	Penyuluhan kurang	Ketersediaan bahan baku tidak menentu

Usaha Penangkapan dan Pengolahan Ikan serta Kegiatan Kemasyarakatan

Nelayan di kedua lokasi pengkajian melakukan penangkapan ikan dengan cara yang relatif sederhana. Sebuah kapal kecil yang diawaki 1 – 3 orang melaut dengan lama melaut sekitar 6 – 8 jam. Modal untuk melaut terdiri dari bekal pangan, rokok, es batu dan bahan bakar. Rata-rata biaya sekali melaut berkisar antara Rp 100.000 – Rp 150.000,- dan hasil yang diperoleh rata-rata dua kali lipat. Memang ada masa puncak dan paceklik, namun angka tersebut menunjukkan rata-rata penghasilan nelayan. Setelah

dipotong modal yang dikembalikan kepada juragan darat atau juragan laut, rata-rata penghasilan mereka sehari sekitar Rp 30 – 50 ribu/KK. Sebenarnya pendapatan demikian termasuk tinggi, namun karena sistim pengelolaan uang yang relatif buruk, maka keluarga nelayan tampaknya kurang sejahtera. Belum lagi jika dilihat sikap hidup yang cenderung konsumtif, termasuk gemar berjudi.

Selain kegiatan penangkapan dan membuat jaring, masyarakat di empat desa di Kecamatan Mundu melakukan berbagai kegiatan yang berbeda. Misalnya, masyarakat Desa Mundu Pesisir melakukan kegiatan pengolahan ikan asin dan berjualan ikan segar (skala kecil). Ada juga pengusaha tepung kerang sebagai sumber kalsium untuk pakan unggas. Namun saat ini usaha pembuatan tepung kerang agak mundur sehubungan dengan merebaknya penyakit flu burung.

Masyarakat Desa Citemu dan Waruduwur banyak yang melakukan kegiatan pengupasan rajungan. Pengupasan rajungan ini tidak dapat dilakukan sepanjang tahun dan puncaknya hanya 2 bulan/tahun, yakni menjelang musim hujan. Rajungan disediakan oleh penjual rajungan atau nelayan. Di desa tersebut telah tercipta sistem pengupasan rajungan, di mana dari penyediaan rajungan, pengupasan dan penjualan ke pihak eksportir telah terpola sedemikian rupa. Pengupasan rajungan ini dalam banyak hal telah mampu memberi pendapatan kepada banyak rumah tangga, meskipun jumlahnya relatif kecil. Rajungan yang telah dikupas dijual ke eksportir yang ada di sekitar desa-desa tersebut. Harga daging rajungan ini ditentukan oleh pihak eksportir, sesuai dengan harga daging rajungan di pasar dunia.

Masyarakat Desa Bandengan umumnya mengolah ikan pindang. Jenis ikan yang dipindang adalah bandeng, kembung, tongkol, layang dan teri nasi. Walaupun sama-sama melakukan pengolahan ikan pindang, masyarakat di Desa Wanepa-nepa, Kecamatan Lakudo, ikan yang biasa dipindang lebih sedikit jenisnya, yakni hanya ikan tongkal dan layang. Proses pembuatan pindang di dua lokasi pada prinsipnya sama. Tabel 4. menyajikan perbandingan proses pembuatan ikan pindang di dua lokasi kajian.

Tabel 4. Proses Pembuatan Pindang di Kecamatan Mundu dan Lakudo

Kecamatan Lakudo		Kecamatan Mundu	
Urutan Kegiatan	Pelaku	Urutan Kegiatan	Pelaku
Membeli ikan	P/L	Membeli ikan	P
Menyusun ikan di panci (tempat memindang) sambil dicuci dan langsung diberi garam yang jumlahnya tidak ada takaran yang khusus	P	Mencuci ikan sampai bersih	P/L
Mengangkut	P/L	Membalut dengan kertas minyak	P
Merebus selama 0,5 jam (dengan sedikit air sampai kering), siap jual	P/L	Menyusun di tempat pindang sambil diberi garam, sereh dan daun salam dengan perbandingan 10:1	P
Jual	P	Merebus: 1-2 jam, air rebusan dibuang, disiram dengan air dingin	P
-		Merebus kembali sampai kering, dinginkan, siap dijual	P
-		Mengangkut	P/L
-		Jual	P

Dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja dalam kegiatan pembuatan ikan pindang, di Kecamatan Mundu lebih banyak melibatkan perempuan karena dari 8 jenis kegiatan, semua dilakukan oleh perempuan dan laki-laki hanya terlibat dalam 2 macam kegiatan (25%). Sedangkan di Kecamatan Lakudo, laki-laki lebih aktif karena dari 5 jenis kegiatan, 3 kegiatan dibantu oleh laki-laki (60%). Perlu dicatat, bahwa pekerjaan menyusun ikan yang memerlukan ketelatenan hanya dikerjakan oleh perempuan, baik di Kecamatan Mundu maupun di Kecamatan Lakudo. Hal ini mungkin disebabkan karena yang menjual ikan pindang itu pun perempuan, maka yang menyusun ikan juga perempuan agar penempatan ikannya sesuai dengan keinginan pembeli.

Selain melakukan penangkapan ikan, masyarakat di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo juga melakukan budi daya rumput. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pembuatan tali yang dikerjakan oleh perempuan (P), pemasangan tali dan penanaman di laut oleh laki-laki (L), panen, pengeringan dan penjualan dikerjakan baik oleh laki-laki maupun perempuan (P dan L). Karena itu dapat dikatakan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan budi daya rumput laut relatif seimbang. Informasi dari tokoh masyarakat menyebutkan bahwa pada umumnya keadaan keluarga yang hanya laki-lakinya saja yang aktif mencari nafkah relatif kurang sejahtera

dibandingkan dengan keluarga yang perempuannya saja yang aktif, apalagi dibanding dengan keluarga dengan suami isteri aktif.

Dalam aspek sosial kemasyarakatan, sebagian besar kegiatan dilakukan secara bersama-sama. Namun kegiatan kemasyarakatan yang banyak menentukan keputusan di tingkat desa seperti gotong royong dan rapat RT dilakukan oleh laki-laki saja, sedangkan perempuan terlibat dalam kegiatan domestik untuk menyediakan konsumsi pada berbagai kegiatan tersebut (Tabel 5).

Tabel 5. Partisipasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan	Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon			Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton		
	L saja	P saja	L +P	L saja	P saja	L +P
Arisan			√			√
Pengajian			√		√	
Remaja Masjid			√			√
Karang taruna			√			√
Perkawinan			√			√
Sunatan			√			√
Kematian			√			√
Membesuk orang sakit			√			√
Gotong royong	√			√		
Koperasi			√			√
Rapat RT	√			√		
Jumlah (frekuensi)	2	0	9	2	1	8

Esensi yang dapat diambil dari semua ini adalah bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan telah menjadi bagian integral dari semua anggota masyarakat desa baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun demikian, masih ada kegiatan sosial kemasyarakatan yang masih menjadi domain laki-laki yakni kegiatan gotong royong dan rapat rukun tetangga (RT). Implikasinya adalah bahwa segala keputusan yang diambil di tingkat RT tanpa mengikutkan suara perempuan karena perempuan tidak terwakili (Tabel 6.)

Tabel 6. Tingkat Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga di Dua Lokasi Kajian

Jenis keputusan	P saja	P dominan	P + L	L saja	L dominan
Pendidikan anak			√		
Kesehatan keluarga			√		
Perawatan anak		√			
Keluarga berencana			√		

Perkawinan			√		
Pengeluaran sehari-hari		√			
Penggunaan alat produksi					√
Penjualan hasil usaha		√			
Jumlah Frekuensi	0	3	4	0	1

Akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya dan manfaat di kedua lokasi kajian rata-rata serupa, yakni baik perempuan maupun laki-laki memiliki akses dan kontrol yang relatif sama untuk mengelola sumber daya dan menerima manfaat. Sebagai contoh, dalam usaha budi daya rumput laut di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, perempuan dapat melakukan pekerjaan mulai dari membuat tali, panen dan mengeringkan hasil rumput laut. Keputusan untuk menjual pun dilakukan secara berunding, baik mengenai jumlah yang akan dijual maupun yang menyangkut harga. Begitu pula dengan usaha ikan pindang baik di Buton maupun di Cirebon, malahan dalam penjualan cenderung perempuan lebih dominan. Untuk penerimaan manfaat hasil usaha, seperti telah disinggung sebelumnya bahwa jika perempuan yang memiliki dan memanfaatkan uang maka akan terjadi perbaikan status gizi dan kesejahteraan keluarga, namun belum tentu jika yang memegang uang itu laki-laki. Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa keluarga yang isterinya bekerja memiliki anggota keluarga yang relatif lebih sejahtera dibandingkan dengan yang hanya laki-laki (kepala keluarga) saja yang bekerja. Jadi manfaat hasil usaha yang dilakukan perempuan dirasakan lebih menyeluruh oleh seluruh anggota keluarga. Manfaat lain dari kredit dan penyuluhan juga sudah dapat dirasakan baik oleh laki-laki dan perempuan. Apalagi dalam kegiatan proyek PEMP yang ternyata banyak juga melibatkan perempuan pengolah ikan. Jadi akses terhadap kredit tidak dibatasi hanya untuk kepala keluarga saja. Demikian juga penyuluhan dari dinas baik Dinas Kelautan maupun Dinas Perindustrian sudah melibatkan perempuan juga.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Masyarakat Pesisir

Keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan subsektor perikanan, khususnya di daerah pesisir sangat ditentukan oleh kemampuan atau kapasitas sumber daya manusia (SDM) setempat sebagai pelaku pembangunan sekaligus sebagai pemanfaat pembangunan. Sebagai pelaku, nelayan diharapkan memiliki pengetahuan dan

keterampilan yang memadai dalam mengelola usahanya. Artinya, membangun SDM adalah membangun manusia agar mampu untuk membangun dirinya sendiri, dalam arti mengenali potensi diri, kendala yang dihadapi dan mampu memformulasikan solusi kendala tersebut, tentunya dengan bantuan fasilitator. Dalam kaitannya dengan membangun SDM ini, maka pada umumnya masyarakat telah bergabung dalam wadah kelompok nelayan.

Pengembangan dan pemberdayaan kelompok nelayan dilaksanakan dengan cara menumbuhkan kesadaran anggota dengan memperkenalkan filosofi *dari, oleh dan untuk* anggota. Suatu kelompok yang terbentuk atas dasar adanya kesamaan kepentingan di antara anggotanya menjadikan kelompok tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan akses terhadap seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, SDM, permodalan, informasi, maupun sarana dan prasarana. Oleh karena itu, kelembagaan kelompok mempunyai peran yang sangat strategis, yakni sebagai penghubung dengan lembaga-lembaga di luar kelompok, sebagai media dalam proses transfer informasi dan teknologi dan sebagai wadah anggota dalam bermitra dengan pihak luar. Disamping itu, kelompok juga berfungsi sebagai wadah interaksi antar anggota dalam satu kelompok dan antar kelompok dalam pengembangan usaha yang dilakukan. Pengembangan kelompok perlu dilakukan dengan pendekatan partisipatif, sehingga orang luar bertindak sebagai fasilitator, sedangkan orang dalam, yaitu kelompok sendiri harus ditumbuhkan inisiatifnya.

Dalam rangka mewujudkan kelompok masyarakat pesisir yang berkemampuan, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) mempunyai keinginan untuk memberikan kontribusi, khususnya dalam kaitannya dengan pengarusutamaan gender. Melaksanakan pengarusutamaan gender dapat dimulai dari instansi formal secara terpadu, baik di tingkat Dati I maupun Dati II. Hasil keterpaduan yang terwujud kemudian baru dapat dilaksanakan di tingkat kelompok, misalnya melalui pendampingan dan pelatihan. Dengan kata lain, tanpa keterpaduan antar-instansi, tampaknya pengarusutamaan gender di tingkat kelompok menjadi sesuatu yang sulit dikerjakan. Kaitannya dengan fokus lokasi, yakni masyarakat pesisir, maka sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor yang langsung berkepentingan.

Peran Instansi Pemda dalam Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Cirebon.

Badan Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan

Struktur kelembagaan yang berkaitan dengan PUG di kabupaten ini relatif masih baru. Pada tahun 2000 unit kerja Pemberdayaan Perempuan berada di Badan Pemberdayaan Masyarakat, tahun 2001 unit ini bernaung di Sekretaris Daerah, yaitu di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan pada tahun 2002 Pemberdayaan Perempuan menjadi Bidang tersendiri dan berada kembali di Badan Pemberdayaan Masyarakat. Sosialisasi tentang pengarusutamaan gender di Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya dan Pertanian belum pernah dilakukan di Cirebon. Dengan alasan mengikuti pola sosialisasi dari pusat, maka di lingkup unit kerja pertanian belum diadakan sosialisasi tersebut. Tetapi sosialisasi telah dilakukan di 9 unit kerja lainnya, yakni Bappeda, BPM, Pengadilan, Pendidikan, BPS, Kesehatan, Departemen Agama, BKKBN dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kelambanan dalam melaksanakan sosialisasi antara lain disebabkan oleh minimnya anggaran yang tersedia serta keterbatasan sumber daya manusia di lingkup unit bidang pemberdayaan perempuan. Di masa depan kegiatan sosialisasi perlu dilanjutkan dalam bentuk lokakarya, sehingga pemahaman tentang pengarusutamaan gender di antara peserta dapat ditingkatkan. Lokakarya semacam ini perlu dilakukan secara berjenjang sampai setiap pejabat di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta komponen masyarakat lainnya yang terlibat dalam pengarusutamaan gender memperoleh pemahaman secara memadai. Dengan tidak tersedianya fasilitator di tingkat kabupaten, maka sulit untuk mencapai target di dalam pengarusutamaan gender di tingkat akar rumput.

Sosialisasi yang dilakukan selama ini umumnya memperoleh tanggapan positif dari para peserta, meskipun sifatnya masih satu arah, artinya, peserta masih relatif pasif. Peran Bidang Pemberdayaan Perempuan di kantor BPM di Kabupaten Cirebon belum signifikan, karena bidang ini baru dibentuk pada TA 2002. Sampai saat ini BPM masih mencari bentuk kegiatan yang pas dengan mandat yang diembannya, sedang kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan simpan pinjam dan yang menjadi fokus adalah ibu-ibu PKK. Khusus dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, belum ada kerja sama kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Cirebon mempunyai program pembinaan masyarakat pesisir. Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu kegiatan yang difokuskan pada penguatan modal pelaku usaha perikanan melalui kredit modal dengan bunga yang disepakati. Administrasi pengembalian pinjaman di tingkat masyarakat dikelola sebuah oleh tim manajemen yang memperoleh insentif dari bunga pinjaman. Kasus di Kecamatan Mundu menunjukkan belum semua kelompok memperoleh pinjaman karena keterbatasan dana yang tersedia. Kegiatan ini mampu mendidik masyarakat untuk berhubungan dengan manajemen keuangan secara formal dan dapat dikatakan sebagai proses mendekatkan masyarakat kepada sistem perbankan. Mengingat peran perempuan di dalam kegiatan pasca panen cukup menonjol, maka pelaksanaan program PEMP ini dapat diintegrasikan dengan program-program pengarusutamaan gender. Kerja sama antara DKP dengan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan tentunya dapat menggarap pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi masyarakat pesisir dengan persepsi gender.

Peran Instansi Pemda dalam Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buton

Badan Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan

Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton tampaknya terdapat masalah koordinasi di dalam program pengarusutamaan gender (PUG). Hal ini terlihat dari terdapatnya dua kantor berbeda yang mengurus PUG di tingkat kabupaten. Pertama, adalah kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang di dalam strukturnya terdapat Sub-bidang pemberdayaan perempuan. Kedua, adalah kantor di lingkup Sekwilda, yaitu di bawah bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), tepatnya di Sub-bagian Pemberdayaan Perempuan. Namun demikian, ke dua kantor tersebut belum saling berkoordinasi, tetapi masing-masing mempunyai kegiatannya sendiri. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya pemahaman tentang PUG, sehingga terdapat duplikasi peran di dalam PUG diantara ke dua kantor tersebut.

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh kantor Sub-bagian PP Sekwilda, antara lain sosialisasi gender bagi 100 orang Tim Penggerak PKK dan partisipasi Kepala Sub-bagian di dalam *workshop* mengenai gender yang diselenggarakan oleh KPP selama 5

hari di Kendari pada tahun 2003, dengan fasilitator dari Australia. Hasil *workshop* tersebut belum pernah disosialisasikan kepada staf di kantor yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme kerja memerlukan perbaikan. Di masa mendatang diperlukan solusi secara menyeluruh kalau diinginkan pengarusutamaan gender dapat dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Buton.

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton saat ini sedang melaksanakan program pembinaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP), antara lain di Kecamatan Lakudo, yakni di Desa Madongka dan Desa Wanepa-nepa. Di Kecamatan Lakudo, usaha masyarakat dilakukan di dua desa, yakni di Desa Madongka masyarakat mengusahakan rumput laut dan mencari ikan, sedang di Desa Wanepa-nepa masyarakat membuat ikan pindang. Di ke dua desa tersebut belum semua kelompok memperoleh pinjaman dari PEMP karena keterbatasan dana yang tersedia. Tampaknya tersedianya modal ini cukup membantu bagi kelompok dalam melanjutkan usahanya sehari-hari. Dalam masa mendatang semestinya DKP dapat duduk bersama dengan kantor BPM untuk membicarakan integrasi antara PUG dengan pembangunan masyarakat pesisir melalui PEMP. Satu hal yang selama ini belum dilaksanakan di tingkat kabupaten adalah mewujudkan kerjasama antara instansi yang bertanggung jawab terhadap PUG dengan DKP.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Ketimpangan gender masih terjadi di kedua lokasi kajian. Ketimpangan terjadi terutama dalam sektor domestik yang secara dominan masih menjadi ranah (*domain*) perempuan. Dari alokasi waktu yang dicurahkan, kondisi laki-laki lebih baik, demikian pula waktu senggang laki-laki lebih banyak. Hal ini dapat mengarah kepada ketidakadilan gender dalam arti salah satu pihak bisa saja dirugikan. Walaupun demikian, di kedua lokasi kajian belum terdapat tanda terjadi ketidakadilan gender karena pihak perempuan belum merasa dirugikan dan merasa bahwa pekerjaan domestik adalah kodratnya. Dengan demikian semua anggota

keluarga termasuk perempuan dapat berpartisipasi lebih baik dalam sektor publik dan sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

2. Hasil penangkapan ikan oleh para nelayan sebenarnya cukup, namun karena pengelolaan keuangan yang kurang baik menyebabkan para nelayan dan keluarga di lokasi penelitian terlihat kurang sejahtera. Berbagai usaha pengolahan ikan yang dilakukan oleh masyarakat di kedua lokasi kajian belum menunjukkan efisiensi yang optimal terbukti dengan hasil analisis finansial yang relatif rendah.
3. Pengarusutamaan gender di kedua lokasi kajian baru dilakukan dalam tahapan sosialisasi di kalangan yang sangat terbatas. Diperlukan waktu dan alokasi dana khusus untuk melakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai wujud pengintegrasian berbagai permasalahan, pengalaman dan kebutuhan gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan aktivitas monitoring dan evaluasi terhadap berbagai penguatan ekonomi masyarakat lokal kawasan pesisir dan pantai.
4. Fasilitasi forum koordinasi lintas sektor yang terkait dalam program pengembangan kawasan pesisir secara terpadu, guna mengatasi berbagai kesenjangan gender yang terjadi di Kabupaten Buton dan Cirebon baru dilakukan untuk tiga unit instansi yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat serta Bagian atau Sub-bagian Pemberdayaan Perempuan, Biro Kesejahteraan Pemda masing-masing kabupaten.
5. Pelatihan teknologi tepat guna yang sangat diperlukan dalam mengembangkan potensi sumber daya alam pesisir dan desa pantai di Kabupaten Buton dan Cirebon adalah berbagai pengolahan ikan tangkap. Misalnya, cara membuat ikan kering, baik asin atau tawar tanpa menggunakan berbagai pestisida yang berbahaya, cara membuat ikan pindang yang rasanya lebih enak, cara mengupas rajungan dengan lebih mudah, budi daya rumput yang lebih baik dan sebagainya. Diharapkan kualitas hasil olahan menjadi lebih baik dan aman sehingga daya jualnya dapat ditingkatkan. Pelatihan tidak hanya menyangkut teknis pengolahan, tetapi juga menyertakan sistem manajemen usaha.

6. Masyarakat pesisir pada umumnya menunggu uluran tangan pihak luar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Proyek PEMP dari DKP yang dimulai tahun 2001 bertujuan untuk mengatasi kesulitan modal masyarakat pesisir dalam melakukan usahanya. Modal hanya merupakan salah satu masalah dari banyak masalah, sehingga ketersediaan modal harus dibarengi oleh usaha-usaha lain agar masyarakat menjadi berdaya.
7. Mengingat kompleksnya permasalahan pengembangan desa pantai, maka kontribusi KPP di dalam pengembangan ekonomi wilayah tersebut dapat dilakukan melalui program pendampingan kelompok yang selama ini telah dibina oleh pihak DKP. Sedangkan partisipasi dari unit kerja lain tetap diperlukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
8. Fokus kontribusi KPP pada pendampingan kelompok dalam rangka mewujudkan kelompok yang mandiri merupakan pilihan tepat mengingat kemandirian merupakan bukti masyarakat yang berdaya. Dengan menjadi berdaya, masyarakat tersebut akan mampu untuk menolong dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.
9. Pendampingan kelompok merupakan suatu proses, sehingga berbagai tahapan pendampingan perlu diikuti meskipun hasilnya tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Berbagai aspek mempengaruhi lamanya pendampingan, seperti kondisi kelompok pada saat awal pendampingan, kualitas fasilitator, dukungan aparat terkait di lokasi dsb.

Rekomendasi

1. KPP perlu lebih menekankan pelaksanaan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh mitra kerja di tingkat kabupaten melalui pelatihan berjenjang. Untuk itu perlu dukungan nyata, terutama dalam hal manajemen pelatihan dan dana. Dengan demikian, masyarakat akan memperoleh pemahaman yang benar tentang pengarusutamaan gender. Pemahaman ini tentu saja akan mempengaruhi pembagian pekerjaan domestik, sehingga pekerjaan tersebut dapat dibagi secara adil di antara seluruh anggota keluarga. Dengan demikian semua anggota keluarga, terutama perempuan juga berpartisipasi lebih baik dalam pembangunan dan dapat menikmati hasil-hasilnya secara lebih adil.

2. Pelatihan yang direncanakan harus meliputi pengetahuan tentang pengelolaan keuangan keluarga, management berusaha, termasuk management pemasaran dan tata buku sederhana yang mudah dipakai oleh pengusaha skala kecil.
3. Khusus untuk pelatihan tentang teknologi kelautan dan perikanan tepat guna sebaiknya menyertakan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya, misalnya universitas, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan serta LSM. Erat kaitannya dengan hal-hal di atas, pembentukan dan penguatan kelompok merupakan pra-syarat penting sebelum berbagai pelatihan tersebut dapat dimulai.
4. Perlu disediakan dukungan sumber daya yang tepat, terutama dana, mengingat penguatan kelompok memerlukan persiapan khusus, seperti rekrutmen fasilitator, pembekalan bagi mereka dsb. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau pekerjaan pendampingan ini diserahkan kepada ahlinya, agar diperoleh tingkat keberhasilan yang optimal.
5. Pemilihan fasilitator yang berkualitas sangat menentukan hasil suatu pendampingan. Demikian pula pembekalan terhadap fasilitator merupakan langkah penting, sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Titik berat materi pendampingan hendaknya pada penguatan kelompok yang meliputi administrasi, organisasi, permodalan, perencanaan dan manfaat yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2003. Monografi Kecamatan Mundu 2002. Cirebon.
- Anonim. 2002. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton 2001. Bau-Bau.
- Asian Development Bank. 2001. *Gender Checklist In Agriculture*. ADB. 53 p.
- Biro Pusat Statistik, 1999. Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Jakarta.
- Departemen Pertanian, 1991. Wanitatani-Nelayan Indonesia: Tinjauan Pustaka Mengenai Pola Pembagian Kerja Wanita dan Pria dalam Rumah Tangga Petani Nelayan Indonesia Dengan Analisis Gender. Departemen Pertanian
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton. 2002. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Pesisir Kecamatan Lakudo. Bau-Bau.
- Harsoyo, E. Harmayani, A. Suryantini. 1999. Dampak Pembangunan Pertanian Terhadap Marginalisasi Tenaga Kerja Wanita: Kasus Usahtani Salak di Kabupaten Sleman. *Jurnal Gender* Vol(1)1: 44-57.

- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. 2002. Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan. Kerjasama dengan UNFPA dan BKKBN. Jakarta.
- Fakih, M. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sajogyo, P. 1987. Pengembangan Peranan Wanita Khususnya di Pedesaan Yang Sedang Berubah dari Masyarakat Pertanian ke Industri di Indonesia 1981-1987. Seminar Fungsi Sosial Ekonomi Wanita Indonesia.
- Vitayala, A.H. 2001. Gerakan Sosial Politik Perempuan di Indonesia: Perspektif Pendidikan Politik. Disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Organisasi Perempuan Dalam Pendidikan Politik yang Berwawasan Moral. Jakarta.